



SUMBER BERITA

RABU, 20 FEBRUARI 2019

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

TGR RSUD Baru Rp 701 Juta

Asep: Kita Sudah Berupaya Menagih

CURUP - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (RL) dan RSUD Curup terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten RL khususnya dan masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya. Bahkan lantaran lokasi RSUD Curup yang berada di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan, RSUD Curup dipindahkan.

Kini RSUD Curup mulai dialihkan pelayanannya di gedung baru

yang berada di lokasi dua jalur yang wilayahnya masuk Kabupaten Kepahiang, meskipun belum keseluruhan. Sedangkan untuk di RSUD Dwi Tunggal pelayanan dilakukan hanya untuk IGD dan Rawat Inap serta beberapa pelayanan lainnya saja. Dan tahun ini rencananya akan dibangun gedung Rawat Inap di kompleks RSUD Jalur Dua sehingga target tahun 2020 seluruh pelayanan total di Jalur Dua.

Namun dibalik itu semua, proses upaya pembangunan masih sedikit menyisakan permasalahan. Diantaranya yaitu soal adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari pembangunan tahun 2017 lalu. Totalnya mencapai Rp 701 juta. Dari hasil audit BPK, TGR yang awal-

nya mencapai Rp 801 juta tersebut masing-masing denda keterlambatan senilai Rp 532 juta dan diselesaikan Rp 80 juta. Serta adanya dugaan kelebihan pembayaran senilai Rp 268 juta dan diselesaikan Rp 20 juta.

Pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan yang harus menyelesaikan kewajiban TGR yaitu PT. Yasuba Dwi Perkasa. Untuk kegiatannya ada empat item, yaitu Gedung Serba Guna, Gedung CSSD, Gedung Radiologi dan Gedung Laboratorium. Sedangkan nilai pekerjaannya mencapai Rp 10 milyar lebih di tahun 2017 lalu.

Direktur RSUD Curup drg. Asep Setia Budiman yang dikonfirmasi kemarin mengakui, mereka sebe-

narnya sudah berupaya melakukan penagihan dari sejak adanya temuan tersebut. Hanya saja memang diakui masih ada sisa yang belum tertagih. Selain itu, dari yang diketahuinya masih ada sisa pembayaran dari Pemkab kepada rekanan tersebut yang juga belum selesai.

"Jadi masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada mereka juga. Karena pembayaran yang diterima perusahaan atas hasil pekerjaan baru sekitar 40 persen. Sedangkan pekerjaan tersebut, progresnya lebih dari itu. Jadi kemungkinan mereka (perusahaan, red) masih menunggu pembayaran dari pemda juga," terang Asep.(dtk)